

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *E-GOVERNMENT* DI DESA GIRIMEKAR KECAMATAN CILENGKRANG KABUPATEN BANDUNG

Faizal Rian Kautsar¹⁾

1)Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan *E-Government* di Desa Girimekar Kecamatan Cilengkrang Kabuoaten Bandung. Penelitian ini di latar belakang oleh belum optimalnya pemanfaatan layanan digital desa, rendahnya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan pembaruan data pada *website* resmi, serta keterbatasan jumlah personil pengelola di Desa Girimekar. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan *e-government* di Desa Girimekar, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini merujuk pada teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup empat dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui teknik wawancara semi terstruktur, observasi non-partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan *e-government* di Desa Girimekar sudah berjalan cukup baik namun belum optimal. Dimensi disposisi dan struktur birokrasi dinilai baik karena komitmen aparatur dan pembagian tugas yang jelas. Namun, kendala utama terletak pada dimensi komunikasi berupa minimnya sosialisasi ke masyarakat, serta dimensi sumber daya terkait keterbatasan personil operator khusus dan literasi digital warga yang masih rendah.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, E-Government, Pelayanan Publik, Pemerintah Desa, Desa Girimekar.

Abstract

This research is titled The Implementation of E-Government Policy in Girimekar Village, Cilengkrang District, Bandung Regency. It is motivated by the underutilization of digital village services, low public outreach, limited updates on the official website, and a shortage of management personnel in Girimekar Village. Based on these issues, this study aims to describe and analyze the implementation of e-government policy in Girimekar Village, Cilengkrang District, Bandung Regency. The theory used as an analytical tool in this research refers to George C. Edwards III's policy implementation theory, which covers four dimensions: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research method applied is a qualitative approach using a descriptive method, where data is collected through semi-structured interviews, non-participant observation, and documentation. Research results show that the

implementation of e-government policies in Girimekar Village has been going quite well, but it's not yet optimal. The disposition and bureaucratic structure dimensions are rated good because of the commitment of the officials and clear task distribution. However, the main challenges lie in the communication dimension, such as limited socialization to the community, and in the resources dimension, related to a lack of dedicated operators and the still-low digital literacy of the residents.

Keywords: Policy Implementation, E-Government, Public Service, Village Government, Girimekar Village.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan dalam tata kelola pemerintahan menuju sistem yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui penerapan *electronic government (e-government)*. Implementasi *e-government* menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi digital dalam proses administrasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Pada tingkat desa, penerapan *e-government* memiliki peran penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang modern, sejalan dengan semangat digitalisasi pelayanan publik dan penguatan otonomi desa. Namun demikian, implementasi kebijakan *e-government* di tingkat desa masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi digital masyarakat, serta belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi.

Transformasi digital dalam sektor pemerintahan juga menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan keterbukaan informasi, mempercepat proses pelayanan, serta memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik. Melalui penerapan *e-government*, hubungan antara pemerintah dan masyarakat tidak lagi terbatas pada pelayanan secara tatap muka, tetapi berkembang menuju pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan transparan. Oleh karena itu, penerapan *e-government* pada tingkat desa menjadi langkah strategis dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penelitian mengenai implementasi *e-government* di tingkat desa masih memiliki relevansi yang tinggi karena setiap desa memiliki karakteristik sosial, sumber daya, dan kondisi kelembagaan yang berbeda. Kondisi tersebut menyebabkan keberhasilan implementasi kebijakan tidak selalu sama antara satu desa dengan desa lainnya. Oleh karena itu, kajian mengenai implementasi kebijakan *e-government* di Desa Girimekar menjadi penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan kebijakan pada tingkat pemerintahan desa serta sebagai bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Desa Girimekar, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung merupakan salah satu desa yang telah mengembangkan layanan berbasis digital melalui *website* resmi desa. Akan tetapi, berdasarkan hasil pengamatan awal ditemukan beberapa permasalahan, di antaranya rendahnya tingkat sosialisasi *website* kepada masyarakat, keterbatasan kemampuan aparatur desa dalam mengelola sistem digital, kurangnya komitmen dalam pemanfaatan teknologi informasi, serta belum optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan *e-government*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan *e-government* di Desa Girimekar masih menghadapi berbagai hambatan yang perlu dikaji lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan *e-government* di Desa Girimekar Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi kebijakan *e-government* di Desa Girimekar, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Fokus penelitian diarahkan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana kebijakan *e-government* dilaksanakan oleh pemerintah desa berdasarkan

teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pendekatan deskriptif digunakan untuk mengungkap fakta dan fenomena yang terjadi di lapangan secara sistematis sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi secara mendalam melalui interaksi langsung dengan informan. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada hasil pelaksanaan kebijakan, tetapi juga menelaah proses implementasi, hambatan, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kebijakan *e-government*. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi nyata yang terjadi di lapangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan informan yang terdiri atas aparatur Pemerintah Desa Girimekar serta masyarakat yang memanfaatkan layanan berbasis digital desa. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, sehingga informasi yang diperoleh dapat diuji kebenaran dan konsistensinya. Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan *e-government* di Desa Girimekar beserta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.

Analisis data dilakukan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data berlangsung hingga penelitian selesai dilaksanakan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dibandingkan serta diverifikasi untuk memperoleh informasi yang valid dan objektif. Melalui proses tersebut, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai implementasi kebijakan *e-government* di Desa Girimekar sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

Selain itu, penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan kondisi nyata yang terjadi di lapangan sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan pelaksanaan kebijakan *e-government* secara objektif.

Keterlibatan berbagai informan yang berasal dari unsur pemerintah desa dan masyarakat memungkinkan peneliti memperoleh sudut pandang yang beragam mengenai implementasi kebijakan tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai kondisi implementasi *e-government* di Desa Girimekar.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan *e-government* di Desa Girimekar Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung telah dilaksanakan melalui pemanfaatan website desa sebagai media informasi dan pelayanan publik. Namun, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal karena masih terdapat berbagai kendala pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagaimana dijelaskan dalam teori implementasi kebijakan George C. Edward III.

Pada dimensi komunikasi, implementasi kebijakan *e-government* di Desa Girimekar belum sepenuhnya efektif. Sosialisasi mengenai keberadaan dan pemanfaatan website desa kepada masyarakat masih terbatas sehingga banyak warga yang belum mengetahui fungsi maupun manfaat layanan digital yang tersedia. Selain itu, penyampaian informasi terkait pelaksanaan *e-government* belum dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan berbasis digital masih relatif rendah. Dengan demikian, aspek komunikasi masih menjadi salah satu faktor yang perlu ditingkatkan agar tujuan kebijakan dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat secara lebih luas.

Selain itu, komunikasi yang belum optimal juga terlihat dari kurangnya penyampaian informasi secara berkelanjutan kepada masyarakat mengenai manfaat dan prosedur penggunaan layanan digital desa. Padahal, komunikasi yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami sangat diperlukan agar masyarakat dapat memahami tujuan kebijakan serta berpartisipasi dalam pemanfaatan layanan *e-government*. Oleh karena itu, peningkatan

kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

Berdasarkan kondisi tersebut, efektivitas komunikasi dalam implementasi kebijakan *e-government* di Desa Girimekar masih memerlukan perbaikan, terutama dalam aspek penyampaian informasi yang berkelanjutan dan mudah dipahami oleh masyarakat. Pemanfaatan media sosial desa, kegiatan sosialisasi langsung, serta keterlibatan perangkat kewilayahan dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan penyebaran informasi kepada masyarakat. Dengan komunikasi yang lebih baik, masyarakat akan lebih memahami manfaat pelayanan digital sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Pada dimensi sumber daya, ditemukan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pendukung *e-government* pada dasarnya sudah tersedia, seperti perangkat komputer, jaringan internet, dan website desa. Akan tetapi, kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki aparaturnya desa dalam mengelola sistem digital masih belum merata. Sebagian aparaturnya desa masih memerlukan pelatihan dan peningkatan kompetensi agar mampu mengoperasikan serta memperbarui informasi pada website secara optimal. Di samping itu, rendahnya literasi digital masyarakat juga menjadi tantangan dalam pemanfaatan layanan *e-government*. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada peningkatan kapasitas aparaturnya serta pemahaman masyarakat terhadap teknologi informasi.

Keberadaan sumber daya yang memadai tidak hanya mencakup ketersediaan fasilitas teknologi, tetapi juga kemampuan aparaturnya dalam mengoperasikan dan mengelola sistem digital secara berkelanjutan. Peningkatan kompetensi aparaturnya melalui pelatihan dan pendampingan teknis menjadi kebutuhan yang penting agar pelayanan berbasis elektronik dapat berjalan secara optimal. Selain itu, peningkatan literasi digital masyarakat juga diperlukan agar layanan yang telah tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Pada dimensi disposisi, penelitian menunjukkan bahwa sikap dan komitmen aparaturnya desa terhadap penerapan *e-government* masih belum sepenuhnya optimal. Sebagian aparaturnya masih terbiasa menggunakan sistem

administrasi secara manual sehingga pemanfaatan teknologi informasi belum menjadi prioritas dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Kebiasaan kerja yang bersifat konvensional tersebut berdampak pada kurang maksimalnya pengelolaan website dan pelayanan berbasis digital. Meskipun demikian, terdapat kemauan dari aparaturnya desa untuk mendukung pelaksanaan *e-government* apabila disertai dengan pembinaan, pendampingan, dan peningkatan kemampuan yang memadai. Dengan demikian, faktor disposisi masih memerlukan penguatan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Sikap penerimaan dan komitmen pelaksana kebijakan menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi *e-government*. Aparatur desa yang memiliki pemahaman dan dukungan terhadap kebijakan akan lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan sistem kerja berbasis teknologi. Sebaliknya, apabila masih terdapat kecenderungan mempertahankan pola kerja konvensional, maka proses transformasi digital akan berjalan lebih lambat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk membangun kesadaran dan komitmen aparaturnya terhadap pentingnya penerapan *e-government*.

Upaya peningkatan komitmen aparaturnya dapat dilakukan melalui pemberian motivasi, pembinaan, serta penguatan budaya kerja yang mendukung inovasi pelayanan publik. Ketika aparaturnya memiliki kesadaran bahwa penerapan *e-government* dapat mempermudah pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, maka pelaksanaan kebijakan akan lebih mudah diterima dan dijalankan. Dengan demikian, perubahan pola pikir aparaturnya menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Pada dimensi struktur birokrasi, implementasi kebijakan *e-government* telah didukung oleh struktur organisasi pemerintahan desa yang jelas. Namun, pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan sistem digital belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Mekanisme koordinasi, pengawasan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan *e-government* masih belum dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Akibatnya, pembaruan data dan informasi pada website desa sering mengalami keterlambatan sehingga

informasi yang tersedia kurang sesuai dengan kondisi terkini. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi internal, penetapan standar operasional prosedur (SOP), serta pengawasan yang lebih konsisten agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

Struktur birokrasi yang jelas dapat membantu pelaksanaan kebijakan berjalan secara lebih efektif karena setiap aparatur memiliki tugas dan tanggung jawab yang terukur. Adanya standar operasional prosedur dan mekanisme koordinasi yang baik akan mempermudah proses pengelolaan sistem digital serta meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pelayanan. Oleh karena itu, penguatan struktur birokrasi menjadi salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan implementasi *e-government* di Desa Girimekar.

Pelaksanaan *e-government* yang didukung oleh struktur birokrasi yang baik akan mempermudah koordinasi antarperangkat desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Adanya pembagian kewenangan yang jelas dapat mengurangi terjadinya tumpang tindih pekerjaan dan mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penguatan sistem koordinasi dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan agar implementasi kebijakan dapat berlangsung secara lebih efektif dan berkesinambungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap dimensi implementasi kebijakan saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kelemahan pada satu dimensi dapat memengaruhi dimensi lainnya sehingga berdampak pada pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya peningkatan implementasi *e-government* perlu dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi secara bersamaan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor pendukung implementasi kebijakan *e-government* di Desa Girimekar. Faktor-faktor tersebut meliputi adanya dukungan regulasi pemerintah mengenai digitalisasi pemerintahan, tersedianya website resmi desa sebagai media pelayanan dan informasi publik, ketersediaan fasilitas teknologi informasi

dasar, serta dukungan dari pemerintah daerah dalam mendorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Selain itu, letak geografis Desa Girimekar yang relatif dekat dengan pusat perkotaan memberikan peluang yang cukup besar dalam pengembangan pelayanan publik berbasis digital.

Selain dukungan sarana dan regulasi, adanya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih cepat dan mudah juga menjadi faktor yang mendukung implementasi *e-government*. Perkembangan teknologi informasi yang semakin luas di masyarakat memberikan peluang bagi pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui sistem digital. Kondisi tersebut dapat menjadi modal yang penting bagi Desa Girimekar dalam mengembangkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa mendatang.

Sementara itu, faktor penghambat implementasi kebijakan *e-government* di Desa Girimekar meliputi rendahnya tingkat sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan kemampuan aparatur desa dalam mengelola teknologi informasi, rendahnya literasi digital masyarakat, kurangnya komitmen sebagian aparatur dalam memanfaatkan sistem digital secara optimal, serta lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan dan pembaruan informasi pada website desa. Faktor-faktor tersebut menyebabkan pelaksanaan *e-government* belum mampu memberikan manfaat secara maksimal bagi masyarakat dan pemerintah desa.

Keberadaan faktor pendukung dan faktor penghambat menunjukkan bahwa implementasi kebijakan *e-government* merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh berbagai aspek yang saling berkaitan. Dukungan regulasi, sarana prasarana, dan komitmen pemerintah perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta partisipasi masyarakat. Dengan demikian, upaya perbaikan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek teknologi, tetapi juga pada penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan *e-government* di Desa Girimekar Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung telah berjalan, namun belum mencapai tingkat optimal. Keberhasilan implementasi kebijakan masih dipengaruhi oleh kualitas komunikasi, ketersediaan dan

kemampuan sumber daya, komitmen pelaksana, serta efektivitas struktur birokrasi yang mendukung pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparatur, penguatan sosialisasi kepada masyarakat, optimalisasi pengawasan, serta pengembangan sarana pendukung agar tujuan *e-government* dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dapat tercapai dengan lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan *e-government* di Desa Girimekar merupakan proses yang masih terus berkembang dan memerlukan upaya penyempurnaan pada berbagai aspek. Setiap dimensi implementasi kebijakan saling berkaitan dan memengaruhi keberhasilan pelaksanaan *e-government*. Komunikasi yang efektif, sumber daya yang memadai, komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi yang mendukung menjadi faktor penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan secara berkelanjutan perlu dilakukan agar tujuan *e-government* dalam menciptakan pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan *e-government* di Desa Girimekar Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung telah dilaksanakan melalui pemanfaatan website desa sebagai sarana penyebaran informasi dan pelayanan publik. Namun, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Pada dimensi komunikasi, sosialisasi mengenai *e-government* kepada masyarakat masih terbatas sehingga tingkat pemanfaatan layanan digital belum maksimal. Pada dimensi sumber daya, ketersediaan sarana dan prasarana sudah cukup mendukung, tetapi kemampuan aparatur desa dalam mengelola teknologi informasi masih perlu ditingkatkan. Pada dimensi disposisi, masih ditemukan kecenderungan aparatur yang lebih nyaman menggunakan sistem kerja konvensional, sedangkan pada dimensi struktur birokrasi masih terdapat kelemahan dalam

koordinasi, pembagian tugas, serta pengawasan terhadap pengelolaan sistem digital.

Selain itu, implementasi kebijakan *e-government* di Desa Girimekar didukung oleh adanya regulasi pemerintah, ketersediaan website desa, fasilitas teknologi informasi, serta dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian, pelaksanaannya juga menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, kurangnya sosialisasi, keterbatasan kompetensi aparatur desa, belum optimalnya komitmen pelaksana, serta lemahnya pengawasan terhadap pembaruan dan pengelolaan informasi digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sosialisasi kepada masyarakat, serta optimalisasi koordinasi dan pengawasan agar tujuan *e-government* dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dapat tercapai secara lebih optimal di Desa Girimekar.

Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-government* di tingkat desa memerlukan dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah desa, pemerintah daerah, serta masyarakat. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia, efektivitas komunikasi, komitmen pelaksana, dan sistem pengawasan yang berjalan dengan baik. Dengan adanya perbaikan pada berbagai aspek tersebut, implementasi *e-government* di Desa Girimekar diharapkan dapat berkembang secara lebih optimal dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. (2012). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, L. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Aji, B., & Nugroho, R. (2022). Implementasi E-Government dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Tingkat Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 145–156.

- Hamim, R. N. (2024). Dampak Implementasi E-Government terhadap Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik di Desa Sukajaya. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 11(1), 67–79.
- Hidayat, A., & Kurniawan, D. (2023). Analisis Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintahan Desa. *Jurnal Administrasi Negara*, 29(3), 210–223.
- Nuralim. (2023). Efektivitas Sistem Informasi Desa Berbasis E-Government di Desa Kertayasa Kecamatan Panawangan. *Jurnal Inovasi Pemerintahan*, 5(2), 88–101.
- Prasetyo, E., & Wulandari, S. (2022). Faktor-Faktor Penghambat Implementasi E-Government pada Pemerintahan Desa di Indonesia. *Jurnal Governance*, 7(1), 45–58.
- Putra, M. A., & Sari, N. P. (2021). Digitalisasi Pelayanan Publik melalui Website Desa sebagai Wujud Good Governance. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 6(2), 134–147.
- Rahman, F., & Yusuf, M. (2023). Implementasi Kebijakan E-Government dalam Mewujudkan Transparansi Pelayanan Publik. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 27(1), 52–66.
- Zein, H. M. (2023). Evaluasi Digitalisasi Webdesaku di Desa Sawahkulon. *Jurnal Teknologi dan Pemerintahan Desa*, 4(1), 25–37.